

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL
DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**YUS AFRIDA
NPM 1621020527**

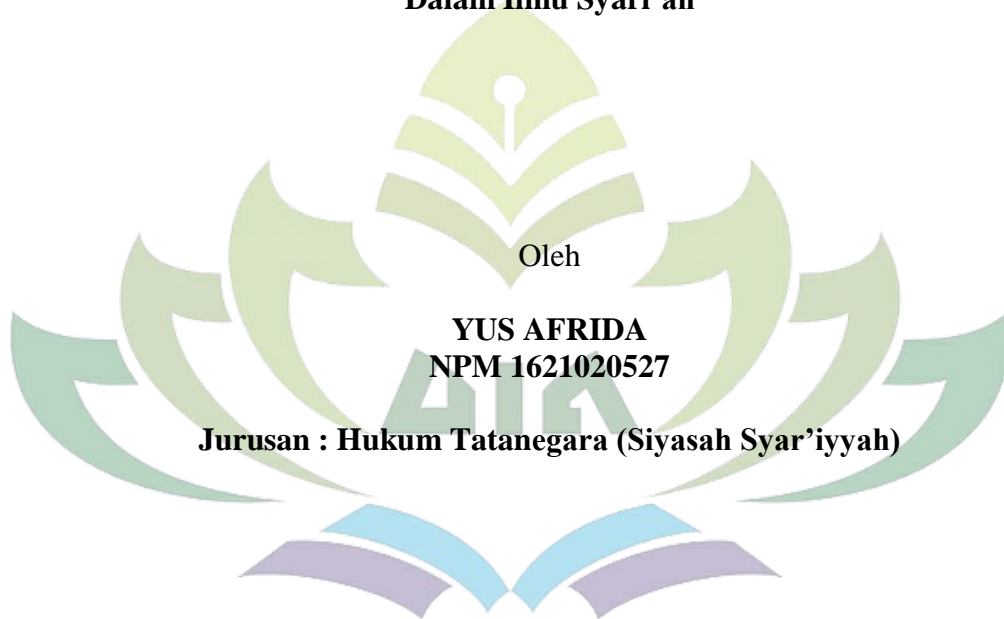
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018 TENTANG PARALEGAL
DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh

**YUS AFRIDA
NPM 1621020527**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Paralegal adalah suatu gambaran bidang pekerjaan, dimana ia bertugas untuk membantu pengacara dalam pekerjaannya. Namun paralegal itu sendiri bukanlah pengacara dan bukan juga petugas pengadilan. Oleh pemerintah, paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum meski ia dianggap sebagai pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2018 diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Salah satu isi Pasal dari Permenkumham ini menegaskan bahwasannya paralegal itu diizinkan untuk memberikan bantuan hukum di dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku, kitab, jurnal, makalah, berita terkini atau artikel. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengelolaannya yaitu *editing, verification, classification*, dan *systemizing*.

Hasil penelitian ini diantaranya, yaitu: *Pertama*, Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu permasalahan Hakim Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan hal-hal dasar yang memberatkan dan meringankan tentang Hak Uji Materi (HUM) terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dimana dasar-dasar pertimbangan hakim itu harus dijelaskan secara rinci dalam putusan guna mempermudah hakim dalam mengambil keputusan akhir. *Kedua*, Dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa setiap manusia harus saling tolong-menolong dalam kebajikan secara universal. Tidak ada batasan ataupun larangan untuk membantu sesama umat dalam hal kebajikan demi tercapainya keadilan. Selain itu bantuan hukum dalam perspektif Islam juga mampu membantu orang yang di dzalimi dan mencegah orang yang bertindak dzalim.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yus Afrida
NPM : 1621020527
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Desember 2019
Penulis,

Yus Afrida
NPM. 1621020527



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lei.Kol. H. Suratmin Sukarame-1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : **Yus Afrida**
NPM : **1621020527**

Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22 P/HUM/2018
TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 19621111994031001

Bandar Lampung, 18 Desember 2019
Pembimbing II

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Frenki, M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum" disusun oleh, Yus Afrida NPM 1621020527 program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal: Kamis, 20 Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Sekretaris : Syeh Syarif Hidayatullah

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP 196210221993031002**

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.¹
(Q.S. Al-Imran : 110)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an An Al-Karim*, (Surakarta: Banyuwang, 2009). h. 64

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Sarliyus dan Ibunda Firdawati yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a,
2. Kakak tersayangku satu-satunya Ahmad Firdaus yang selalu memberikanku inspirasi, motivasi dan semangat.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Yus Afrida, lahir pada tanggal 26 Juni 1998 di Bukit Kemuning Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan Anak Kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Sarliyus dan Ibu Firdawati. Beralamat di Gg. Tangerang No.52 Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Indonesia.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslimin (TK Muslimin) Pada Tahun 2003. Selama menjadi murid TK Muslimin penulis sering mengikuti kegiatan seni tari seperti tari sembah dan tari dindin pak dindin.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Bukit Kemuning (SD N 1 Bukit Kemuning) pada tahun 2004. Selama duduk dibangku Sekolah Dasar ini penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Olahraga (voli) dan Drumband (Pemegang alat musik Bilira).
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Kemuning (SMP N 1 Bukit Kemuning) pada tahun 2010. Selama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama ini penulis aktif dalam OSIS dan ekstrakurikuler Olahraga dan Tari.
4. Pada Sekolah Menengah Akhir, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA N 1 Bukit Kemuning pada tahun 2013. Selama Sekolah Menengah Atas penulis aktif dalam kepengurusan OSIS dan ekstrakurikuler Olahraga (Basket).
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 10 Desember 2019
Penulis,

Yus Afrida
1621020527

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.

3. Bapak Frenki. M. Si sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan, Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H., Dan Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Ayahandaku (Sarliyus) dan Ibunda tercinta (Firdawati) dan Abang satu-satunya (Ahmad Firdaus), yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan menemani dalam keadaan apapun, M. Rafirsa Agung Pratama, M. Edward Rinaldo Fenti Lestiana, Evi Novitasari, Fitra Rinaldi Fasya, Heni Aprilia, Dea Indah Monica, Lisa Anisa Fricchillia, Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Presidium Generasi

Baru Indonesia (GenBI), Kelompok KKN Kelompok 169 dan Kelompok PPS Akselerasi III.

9. Saudara-saudara seperjuangan dalam menuntut ilmu Siyasah G (@siyasahg_aul) angkatan 2016.

10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Bandar Lampung, 10 Desember 2019

Penulis,

Yus Afrida

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian Paralegal	18
2. Dasar Hukum Paralegal Melakukan Bantuan Hukum	24
3. Rekrutmen Paralegal	26
4. Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Hukum Indonesia	29
5. Tugas Pokok Paralegal	36
6. Fungsi Paralegal	37
7. Kriteria Menjadi Paralegal	40
8. Batas Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	42
9. Jaminan Seseorang Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum di Indonesia	45
10. Tentang Hukum Islam	52
B. Tinjauan Pustaka	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	65
1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum	65
2. Pemohon dan Kepentingan Hukum.....	66
3. Pokok Perkara	69
4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	71
B. Deskripsi Data Penelitian	75
1. Pendapat Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Permohonan	75
2. Amar Putusan	78

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum	81
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Rekomendasi.....	105

DAFTAR PUSTAKA 107**LAMPIRAN-LAMPIRAN** 112

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam
Pemberian Bantuan Hukum.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk memfokuskan pemahaman kita agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum**”.

Terdapat beberapa istilah di dalam judul skripsi ini dan penulis rasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Kupasan mengenai suatu soal.¹
2. **Hukum Islam** adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²

¹ Rudi Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8.

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Jakarta: Raya Carafindo, 2009), h.

3. **Putusan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hasil memutuskan.³ Putusan merupakan hasil akhir dari berdiskusi terkait suatu masalah yang dihadapi.
4. **Paralegal** menurut *Black Law Dectionary* dalam bukunya Mulyana W. Kusumah menyatakan bahwa Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasihat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.⁴
5. **Bantuan Hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum”, adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Penulis merasa permasalahan yang terdapat dalam judul skripsi ini menarik untuk dikaji, yaitu untuk mengetahui lebih jelas apa yang

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 275.

⁴ Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, (Jakarta: YLBH, 1991), h. 27.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

2. Alasan Subyektif

Penulis memiliki beberapa alasan yang dapat diuraikan dalam alasan subyektif ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pembahasan pada skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di jurusan Siyasa Syar'iyah pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya bahan-bahan penelitian atau literatur, objek penelitian dan prasarana dalam penelitian ini sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum ialah instrumen paling penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu seseorang yang tidak

mampu dalam bidang hukum.⁶ Hal ini telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷ dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum.⁸

Bantuan hukum di Indonesia hingga saat ini sangat memprihatinkan, penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga tidak heran jika timbul krisis kepercayaan terhadap penegak hukum oleh para pencari keadilan. Contohnya sebut saja kasus Mbah Minah yang dipidana karena mencuri 3 buah Kakao⁹ merupakan salah satu contoh penegakan hukum yang setengah hati. Kemudian kasus seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya.¹⁰ Masih banyak kasus-kasus lainnya yang sejenis ini disebabkan karena memang belum ada organisasi yang benar-benar peduli akan pentingnya melindungi hak-hak kaum marjinal.

⁶ Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 26.

⁷ Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁸ Andi Ferry Mulyanuddin, *Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Barat*. (Dibuat dalam laman Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 20 Juli 2017).

⁹ Muhammad Ridho, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, (On-Line) diakses pada tanggal 5 Mei 2019 <https://m.detik.com/news/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari.com> diakses pada tanggal 5 Mei 2019.

¹⁰ Liputan 6, *Memungut Kaus Lusuh, Buruh Tani Dibui*, (On-Line) diakses pada tanggal 5 Mei 2019 <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kasus-lusuh-buruh-dibui.com>

Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis dalam tulisan ini akan membahas peran paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum.¹¹ Dalam perkembangannya memang belum ada definisi yang seragam tentang paralegal, bahkan di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang baru. Namun dalam berbagai literatur yang penulis baca pada intinya menyebutkan bahwa paralegal itu adalah seseorang yang bukan Sarjana Hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kedudukan paralegal saat ini telah mendapatkan legitimasi formil setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan pengakuan ini, peluang untuk memberikan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada advokat saja, karena dosen, mahasiswa dan paralegal dapat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan. Namun di sisi lain, perlu penulis sadari bahwa peran paralegal ini hanya terbatas pada bantuan hukum non-litigasi yaitu sebagai mediator pada sebuah konflik industrial. Mengingat begitu sedikit advokat di Indonesia yang mau memberikan bantuan hukum secara probono, peran paralegal ini sangat membantu memberikan akses keadilan yang lebih lagi bagi masyarakat miskin dan marjinal, walaupun hanya terbatas pada kegiatan non-litigasi.

¹¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Hadirnya Undang-undang Bantuan Hukum yang memberikan pengakuan kepada paralegal, dosen dan mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum (di samping advokat), sangat diharapkan agar keadilan bukan lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat. Selain itu, melalui Undang-Undang Bantuan Hukum ini dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi paralegal untuk memberdayakan dan juga mengedukasi masyarakat.

Sayangnya bantuan hukum oleh paralegal masih kurang efektif di Indonesia karena memang di setiap daerah belum tentu ada paralegalnya. Untuk mengatasi masalah ini sangat penting untuk didirikan posko bantuan hukum yang mengadakan pelatihan bagi paralegal pada setiap daerah-daerah di Indonesia agar program *melek hukum* dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, berkembangnya organisasi paralegal yang semakin meluas dan dapat bersinergis antar daerah pada nantinya dapat kita jadikan strategi untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Sebagai jawaban atas persebaran bantuan hukum yang tidak merata antara kota-kota besar dengan daerah-daerah terpencil serta sebagai upaya memenuhi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, paralegal baik yang berlatar belakang hukum maupun non-hukum kini diperkuat eksistensinya untuk menjangkau bantuan hukum. Bukan hanya untuk perkara non-litigasi, namun telah memasuki ranah litigasi.

Ketentuan ini diatur melalui aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar.¹²

Untuk urusan litigasi di luar persidangan memang dapat melibatkan paralegal, namun berbeda halnya dengan pendampingan dalam persidangan, mengingat orang yang sudah lulus ujian advokat tapi belum disumpah saja tidak bisa beracara di dalam persidangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan paralegal di Indonesia dengan pembatasan bahwa negara membiayai paralegal untuk masyarakat sepanjang terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini juga mengatur tentang tata cara bagaimana Warga Negara Indonesia dapat menjadi paralegal.¹³

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

¹³ *Ibid.*

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana dasar dan apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan dengan Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kemudian bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

E. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap Hakim dalam menguji Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dari skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan)

Secara teoritis kegunaan skripsi ini yaitu untuk Menambah khazanah intelektual bagi individu atau kelompok guna mendapatkan akses informasi yang komprehensif mengenai paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

2. Secara praktis (bagi masyarakat)

Secara praktis kegunaan skripsi ini yaitu untuk Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau untuk bahan penelitian lanjutan dan/atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini difokuskan

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan perspektif.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, adapun pengertian dari sifat penelitian deskriptif analisis ini yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu di antaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

¹⁶ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 13-14.

¹⁷ Muhammad Hadjon Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 1.

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 29.

berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹

2. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰ Data dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan,

¹⁹ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Di mana bahan hukum ini bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.²¹ Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kemudian putusan-putusan hakim, sebagai pokok penelitian adalah Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.²²

²¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Ibid.*, h. 141.

²² *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²³ Di antaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Hukum dan istilah-istilah yang lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.²⁴ Diantaranya berupa data pustaka, di mana referensi buku-buku terkait, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan aturan-aturan Pemerintah seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait

²³ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 68.

²⁴ Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012), h. 22.

penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca dan selanjutnya penulis melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan untuk dimasukkan ke dalam bagian skripsi penulis.

4. Metode Pengolahan Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, maka yang perlu diperhatikan ada dua hal. *Pertama*, yang perlu diperhatikan dalam pendekatan konseptual, harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum kemudian didukung juga dengan buku-buku hukum terkait.²⁵

Sementara yang *Kedua*, pendekatan perundang-undangan, yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang akan dipecahkan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.²⁶

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu:

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, *Ibid.*, h.297.

²⁶ *Ibid.*, h. 302.

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Verifikasi Data (*Verification*), yaitu mengelompokan data dan memahami makna dari data tersebut
- c. Klasifikasi Data (*Classification*), yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan
- d. Sistematisasi Data (*Systemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.²⁷

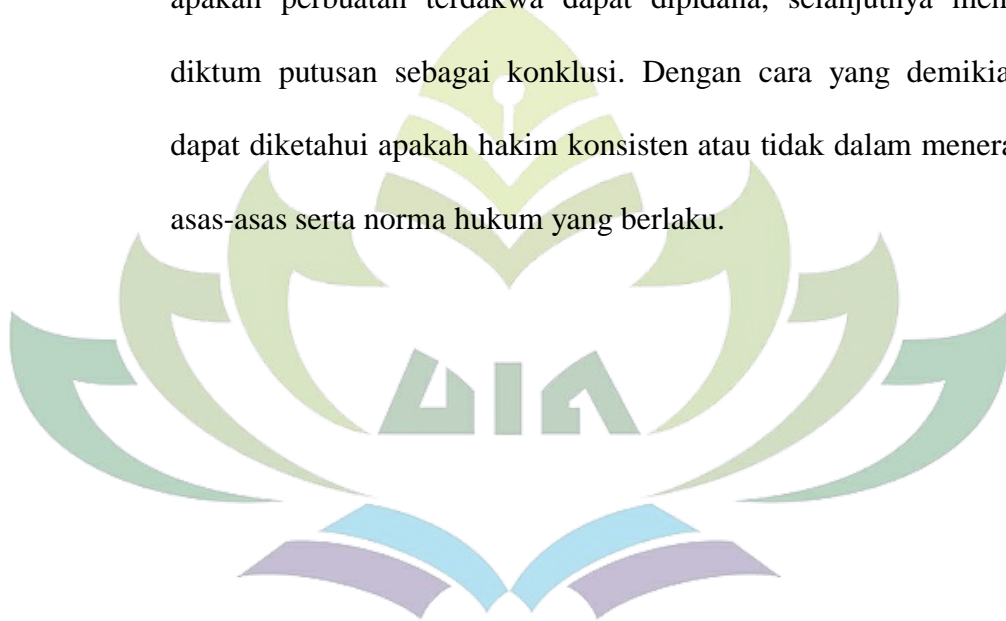
5. Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam melakukan analisis penulis berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto seperti berikut ini: “Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya”.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Ibid.*, h. 126.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002). h. 14.

Hal ini apabila dikaitkan dengan data yang diteliti yakni tentang putusan hakim, maka dalam memberikan putusan, tampak penggunaan pola pemikiran silogisme. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian diterapkan hukumannya yang cocok untuk faktor-faktor itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana, selanjutnya menyusul diktum putusan sebagai konklusi. Dengan cara yang demikian ini dapat diketahui apakah hakim konsisten atau tidak dalam menerapkan asas-asas serta norma hukum yang berlaku.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Paralegal

Istilah paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu advokat dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah advokat bukan juga petugas pengadilan, oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diizinkan untuk berpraktik hukum. Paralegal adalah orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Bahkan, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa paralegal bukanlah Sarjana Hukum. Tugas paralegal umumnya adalah membantu advokat, di antaranya untuk pekerjaan administratif dan pengarsipan dokumen.²⁹ Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering disebut sebagai asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari peran seorang paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparaturnya penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok dalam masyarakat.

²⁹ Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)* Cet ke-3, (Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019), h. 1.

Definisi paralegal yang lainnya adalah seseorang yang khusus membantu masyarakat miskin dan marjinal yang karena keterampilan khusus dan memiliki pengetahuan dasar hukum serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum dan bimbingan kepada masyarakat. Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan hukum guna menyelesaikan masalah-masalah hukum.³⁰

Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap dan memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-hak masyarakat). Paralegal sama dengan paramedik, walaupun ia bukan dokter tapi ia memahami tentang ilmu kedokteran. Demikian pula dengan paralegal yang bukan sarjana hukum, tetapi mengerti dan paham tentang masalah hukum. Dalam sistem hukum di beberapa negara lain, paralegal adalah perpanjangan tangan dari advokat.³¹

Berbagai organisasi hukum menawarkan definisi resmi paralegal, definisi ini biasanya memiliki sedikit perbedaan. Definisi yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi besar ini meliputi:

³⁰ Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar

³¹ Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*. Ibid.

- a. Organisasi *National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya* mendefinisikan paralegal ialah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat advokat atau pengacara.
- b. ABA (*American Bar Association*) sendiri mendefinisikan paralegal adalah orang yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun di bawah tanggungjawab langsung pengacara. Definisi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.
- c. NFPA (*National Federation of Paralegal Association*) Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh Undang-Undang pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substansif pekerjaan ini perlu pengakuan evaluasi, organisasi, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum.

- d. Organisasi NALA (*National Association of Legal Assistants*) Amerika Serikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum melalui pendidikan formal, training dan pengalaman, paralegal mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai sistem hukum substansif dan hukum prosuderal serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara.
- e. AAFPE (*American Association For Paralegal Education*), paralegal melakukan pekerjaan hukum substansif dan prosuderal yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak dapat dilakukan oleh pengacara. Paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum. Paralegal mematuhi standar etika dan aturan tanggungjawab profesi.³²

Hak atas keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

³² “Paralegal” (On-line) diakses pada tanggal 24 September 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal.com>

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³³

Oleh karena itu pengakuan, perlindungan dan kemajuan serta pemenuhan di dalam setiap kebijakan dan pemberlakuan hukum merupakan hak dasar manusia setiap warga di Indonesia. Wujud dari hak atas keadilan antara lain adalah lewat bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal. Bantuan hukum selama ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lewat pekerja bantuan hukum dan paralegal. Dalam perjalanannya sampai saat ini, paralegal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bantuan hukum. bahkan paralegal telah menjadi aktor kunci dalam pemenuhan akses kepada keadilan.

Beberapa Lembaga Bantuan Hukum di beberapa daerah sudah mulai mendorong lahirnya paralegal sekitar tahun 1970-an. Pembentukan paralegal adalah salah satu strategi layanan bantuan hukum berbasis komunitas yang terintegritas dalam sistem bantuan hukum nasional. Apalagi paralegal sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem bantuan hukum nasional di mana paralegal merupakan perpanjangan tangan dan secara kelembagaan terkoordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Langkah ini tentunya masih memerlukan penyempurna khususnya terkait sistem pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai Organisasi Bantuan Hukum, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum secara tegas menyatakan bahwa: “Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum”. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Huruf (c) menyatakan bahwa: “Pemberi bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum”.

Siapapun bisa menjadi Paralegal, merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan persyaratan untuk menjadi paralegal tidak rumit karena pendidikan formal dan usia dewasa sesuai hukum perdata yaitu minimal berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat seperti lulusan S1 Hukum, mahasiswa hukum dan mahasiswa jurusan lain yang paham mengenai advokasi, pemimpin komunitas, ketua suku, pemuka agama, tokoh pemuda, aktivis serikat tani, guru dan anggota komunitas masyarakat lainnya.³⁴

³⁴ Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*. Ibid., h. 2-4.

2. Dasar Hukum Paralegal Melakukan Bantuan Hukum

Paralegal di dalam sistem Tata Hukum di Indonesia secara tertulis baru diakui di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, itupun tidak secara khusus mendefinisikan maupun mengatur tentang persyaratan dan peranan paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum. Paralegal menjalankan fungsi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, berikut aturan yang telah mengatur paralegal untuk memberi layanan bantuan hukum dalam perundang-undangannya, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang memberikan kewenangan kepada relawan pendamping untuk memberikan pendampingan kepada korban dalam setiap tahapan pemeriksaan dari penyidikan sampai persidangan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang memberikan kewenangan kepada Serikat Pekerja/Buruh untuk beracara mewakili Pekerja/Buruh di pengadilan hubungan industrial.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu memberikan kewenangan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, saksi maupun tersangka/terdakwa.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu memberikan kewenangan kepada paralegal dalam hal bantuan hukum litigasi.³⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian dalam Pasal 9 Huruf a menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen maupun mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Fungsi paralegal diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Pasal 16 ini mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non-litigasi, pada Pasal 16 Ayat (2) mengamanatkan adanya 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

³⁵ Sumaindra Jawardi, *Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakan Hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut)*, (Bandar Lampung, 2018), h. 32-33.

3. Rekrutmen Paralegal

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Persyaratan untuk menjadi paralegal telah diatur secara khusus oleh lembaga atau instansi yang melakukan pendaftaran paralegal. Secara umum syarat menjadi paralegal adalah sebagai berikut ini:

- a. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
- b. Klien Lembaga Bantuan Hukum dan aktif di komunitas.
- c. Bersedia melakukan kerja-kerja advokasi.
- d. Untuk jaringan ia memiliki fokus pada kerja-kerja advokasi Hak Asasi Manusia.
- e. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu masyarakat desa (*voluntarian*).
- f. Mengisi lembar konfirmasi.

Calon pendaftar disarankan untuk mengisi formulir pendaftaran dan untuk melampirkan dokumen memiliki beberapa ketentuan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Mahasiswa
 - 1) Fotocopy transkrip nilai,
 - 2) Fotocopy kartu identitas, dan
 - 3) Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

b. Umum

- 1) Fotocopy ijazah terakhir,
- 2) Fotocopy kartu identitas,
- 3) Pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, dan
- 4) Riwayat hidup.

Seorang yang telah mendaftar sebagai paralegal maka harus mengikuti segala pelatihan-pelatihan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Instansi yang menaungi paralegal. Pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan oleh Lembaga atau Instansi paralegal tempat bernaung diantaranya seperti:

- a. Nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang paralegal ketika melakukan kerja-kerja paralegal yaitu: kejujuran, keterbukaan, adil, bertanggungjawab, anti kekerasan dan indepedensi.
- b. Tidak membedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin.
- c. Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia.
- d. Memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakan keadilan dengan berbagai resiko.
- e. Tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Seseorang yang telah menjadi paralegal harus memiliki sikap dan kepribadian sebagai berikut ini:

- a. Memiliki kejujuran,
- b. Bersifat kesatria dan berbudi luhur,
- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- d. Memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum dan tertindas tanpa membedakan seseorang dalam bentuk apapun,
- e. Mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik paralegal,
- f. Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat,
- g. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun,
- h. Mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya,
- i. Berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin,
- j. Kreatif dalam memanfaatkan cara-cara etis dan sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat,

- k. Mampu menggalang kerjasama dengan berbagai profesi dalam upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya,
- l. Dalam pendampingan kasus-kasus yang bersifat keperdataan sedapat mungkin menyelesaikannya secara damai dan menghargai aturan, kebiasaan-kebiasaan, budaya dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.³⁶

4. Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara legitimasi kedudukan paralegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahkan bila diteliti lebih jauh beberapa substansi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menutup jalan bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum yang berimbas pada tertutupnya akses keadilan bagi masyarakat. Beberapa Pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi: “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”.
- b. Pasal 31 yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan

³⁶ Firman Candra, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)*. Ibid., h. 5-7.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Pada sistem hukum yang ada kedudukan paralegal dikukuhkan oleh kelemahan dari implementasi Undang-Undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHP, sebagai contoh adalah bunyi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan para advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma. Namun secara nyata dapat kita lihat dari segi kuantitas jumlah advokat masih sangat sedikit dan distribusi mereka belum merata di setiap daerah. Para advokat telah banyak membuka praktik di daerah perkotaan, akan tetapi sangat jarang seorang Paralegal maupun Advokat yang membuka kantor hukum di pedesaan apalagi di daerah terpencil.

Selain karena kelemahan dari implementasi berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum. secara politik keberadaan paralegal menjadi semakin eksis dan semakin dibutuhkan karena berbagai kebijakan pemerintah yang sering tidak berpihak kepada rakyat kecil sehingga menimbulkan grafik konflik yang cukup tinggi dalam masyarakat dan di sisi lain pemerintah juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum pada warga negaranya. Bantuan hukum masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, hal ini berbeda dengan pelatihan yang begitu besar di bidang kesehatan, di mana pada setiap kecamatan dibangun

PUSKESMAS dan ditiapnya dibangun POSYANDU. Padahal kebutuhan masyarakat akan akses keadilan sama pentingnya dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Hal yang paling menarik untuk penulis kemukakan adalah isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT), dimana dalam 2 (dua) Pasalnya menyebutkan peranan dan eksistensi paralegal dalam pendampingan korban, antara lain:

- a. Pasal 22 Ayat (1) yang menyebutkan: dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
 - 2) Memberikan informasi bagi hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat alternatif.
 - 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pasal 22 Ayat (2) yang menyebutkan: Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah daerah atau masyarakat.

b. Pasal 23 yang menyebutkan: dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- 1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendamping.
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. Dengan membimbing korban secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
- 3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga merasa aman didampingi oleh pendamping.
- 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja sosial dan relawan pendamping yang disebutkan dalam 2 (dua) Pasal di atas merupakan bagian dari paralegal, di mana pekerjaan yang mereka lakukan antara lain dengan memberikan konsultasi hukum, penyadaran hukum, pendampingan korban dan sebagai penghubung antara korban dengan sistem peradilan pidana yaitu kepolisian. Kejaksaan dan pengadilan merupakan sebagian dari ruang lingkup dari pekerjaan paralegal. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa negara mengakui peranan paralegal yang sangat penting untuk membuka akses masyarakat terhadap keadilan.

Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi; “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam konteks pengabdian masyarakat juga sebuah bentuk legitimasi formil secara tidak langsung bagi paralegal, khususnya paralegal yang berasal dari para mahasiswa hukum serta para akademisi yang aktif di Biro Bantuan Hukum.”

Selanjutnya eksistensi seorang paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formil saja, karena secara legal formil eksistensi paralegal tidak pernah diakui dan tidak pernah disebutkan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun dalam sistem hukum Indonesia, namun telah dikukuhkan melalui legitimasi sosial dari masyarakat. Paralegal ada dan dapat eksis sampai sekarang karena keberadaan mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat marjinal ataupun yang kurang mampu yang keberadaannya sering terlupakan oleh pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sejarah paralegal di atas, paralegal di Indonesia sendiri berkembang sejak tahun 1970-an. Seiring perkembangan gerakan bantuan hukum baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

Pada pola pendekatan sosial itulah tampak bahwa paralegal memiliki peranan untuk membantu kelima aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana meski melalui jalur non-litigasi. Pada saat paralegal mendampingi klien yang merupakan korban, paralegal mencoba membantu pihak kepolisian dan kejaksaan dengan memberikan data dan informasi sebagai masukan untuk menunjang alat bukti. Paralegal juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasus yang didampingi ditangani dengan benar dan sesuai prosedur oleh aparat hukum yang berwenang. Sedangkan pada saat posisi klien sebagai pelaku, paralegal berperan sebagai intermediasi yang menghubungkan klien dengan advokat. Sebab, hanya advokatlah yang dapat beracara di pengadilan. Disini paralegal hanya dapat membantu advokat untuk melakukan investigasi kasus, pengumpulan alat bukti, dokumentasi, administrasi dan lain sebagainya.³⁷

Kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *out of the system*, sehingga peranan mereka hanya sebatas dalam pemantauan, pengawasan, serta memberikan dorongan pada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan untuk bekerja secara cepat, tepat dan sesuai prosedur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 8 Ayat (1)

³⁷ Sumaindra Jawardi, *Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakan Hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut)* Ibid., h. 20-23.

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, Ayat (2) syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan Hukum.
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
- d. Memiliki pengurus.
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus:

- a. Melakukan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum.
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.³⁸

5. Tugas Pokok Paralegal

Sesuai Pasal 13 dan 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ada tugas pokok Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Tugas dari paralegal tersebut terdiri dari 3 macam tugas, diantaranya:

1. Tugas Pemberian Bantuan Hukum:
 - a. Melakukan investigasi kasus,
 - b. Melakukan konsultasi hukum,
 - c. Melakukan pendampingan di luar pengadilan,
 - d. Mediasi, dan
 - e. Negoisasi.

³⁸ Anis Hamim dan Siti Rosmawati, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rika Annisa Women's Crisis Center, 2014). h. 7-10.

2. Tugas Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Melakukan pendidikan hukum pada masyarakat di lingkungan sekitar atau komunitas, dan
 - b. Melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar atau komunitas.
3. Tugas Pendokumentasian kegiatan pengumpulan data (baik berupa dokumen maupun foto) yang berkaitan dengan kerja-kerja paralegal.³⁹

6. Fungsi Paralegal

Fungsi dari Paralegal yang mengarah pada dua sisi yaitu sisi bantuan hukum secara litigas dan sisi berikutnya bantuan hukum secara non-litigas. Dalam konteks non-litigasi, paralegal melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat. Di sini paralegal memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan secara litigai fungsi paralegal ialah untuk mendukung advokat dalam penanganan kasus.

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan kasus, mediasi, advokasi dan pelimpahan kasus. Dalam konteks litigasi karena Paralegal tidak memiliki izin beracara, maka kasus yang ditangani dilimpahkan kepada advokat, baik itu Lembaga Bantuan Hukum ataupun Kantor

³⁹ *Ibid.*, h. 34-35.

Hukum yang terpenting advokat tersebut memiliki komitmen dan alur pemikiran yang sejalan dalam menangani kuasa.⁴⁰ Berikut table mengenai fungsi paralegal:

Tabel Fungsi Paralegal Berdasarkan Kegiatan Dan Tindakannya⁴¹

No.	Kegiatan	Tindakan
1.	Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat	Mendorong masyarakat untuk mengorganisir diri dalam menghadapi masalah-masalah mereka, membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri. Seseorang pekerja paralegal akan mengorganisir pertemuan-pertemuan, program-program kebudayaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat masyarakat dapat memperkuat rasa solidaritasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan organisasi mereka sendiri.
2.	Mendidik dan melakukan penyadaran	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan memberikan informasi mengenai hukum-hukum. Peran tersebut termasuk memberikan informasi mengenai program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah dan mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut.
3.	Melakukan analisa sosial	Analisa sosial ini untuk membantu paralegal dan masyarakat dalam memahami sifat struktural yang terjadi dan digunakan oleh mereka dalam menemukan jalan pemecahan terhadap persoalan-persoalan tersebut.
4.	Advokasi	Paralegal dengan bantuan para pengacara atau lainnya, melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan yang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 35-37.

⁴¹ Sumaindra Jawardi, *Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakan Hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut)* *Ibid.*, h. 20-23.

		dihadapi masyarakat kepermukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka.
5.	Membimbing, mediasi (perantara) dan mendamaikan	Paralegal mampu memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan mediasi dan konsolidasi dalam perselisihan-perselisihan yang timbul diantara anggota masyarakat. Sebagai jalur damai (konsiliator) harus mendorong anggota masyarakat untuk mengadakan perundingan (negoisasi) dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.
6.	Bantuan hukum	Paralegal disini memberikan pemecahan awal secepatnya dalam keadaan darurat, misalnya dalam hal terjadinya pengusuran masyarakat, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat.
7.	Jaringan kerja	Hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lain serta individu-individu (seperti wartawan, peneliti, akademisi dan agamawan) guna mendapatkan dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
8.	Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutan	Menggerakan masyarakat untuk melakukan aksi protes seperti mengajukan (melakukan perundingan/dialog) tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang terkait.
9.	Dokumentasi	Mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masyarakat, merekam kegiatan-kegiatan yang dilakukan paralegal. Paralegal juga harus melakukan pengarsipan yang menyangkut kasus-kasus yang dibela dan salinan surat-surat penting khususnya yang mempunyai kaitan dengan masyarakat.
10.	Mongkonsep surat-surat	Memantau masyarakat untuk membuat surat-surat permohonan, pengaduan-pengaduan, pernyataan tertulis, petisi-

		petisi dan surat resmi lainnya. Paralegal harus meminta bantuan kepengacara bila diperlukan untuk memberikannya kepada masyarakat.
11.	Membantu pengacara	Bila terdapat kasus-kasus yang harus ditangani oleh seorang pengacara, maka pekerja paralegal dapat membantu pengacara dengan melakukan penyidikan-penyidikan awal, mewawancarai para klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus, serta melakukan penelitian hukum bahkan juga membantu mengkonsepkan pembelaan yang sederhana.

*Sumber tabel di atas telah diolah oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung pada tahun 2018

7. Kriteria Menjadi Paralegal

Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi paralegal, yang terpenting adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi paralegal tersebut memiliki kepedulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah (buta hukum). Selain daripada itu, seseorang yang ingin menjadi paralegal harus mempunyai kemampuan untuk melakukan pendampingan yang kasusnya sederhana. Ada beberapa kriteria untuk menjadi paralegal yang akan penulis sampaikan,⁴² di antaranya:

- a. Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik formal maupun materil,
- b. Memiliki kemampuan untuk memotivasi masyarakat,
- c. Memiliki kemampuan untuk menganalisa permasalahan dan meletakkannya dalam kerangka kerja proses pembelaan,

⁴² *Ibid.*, H. 38.

- d. Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara optimal,
- e. Mampu membangun relasi kerja yang partisipatif, sehingga klien dapat terlibat aktif dalam seluruh proses pembelaan.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, paralegal harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum mengingat pada saat memasuki wilayah hukum ada hal-hal teknis yang harus dipahami oleh paralegal karena tidak semua paralegal berlatar belakang pendidikan hukum di perguruan tinggi, bahkan banyak dari mereka yang sama sekali tidak mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan dan pelatihan hukum diberikan sebelum mereka menjalankan pekerjaan sebagai paralegal. Selanjutnya setelah mereka mahir sebagai paralegal mereka akan mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sebagai seorang paralegal, baik dalam pendidikan dan pelatihan terdahulu serta berdasarkan pengalaman sehingga akan terciptalah paralegal-paralegal baru secara berkesinambungan. Pada pelatihan dan pendidikan hukum ini mereka diajarkan mengenal dasar-dasar hukum formal dan materil serta beberapa tahapan analisa hukum pada penanganan kasus,⁴³ seperti:

- a. Eksplorasi kronologi kasus,
- b. Inventarisasi aspek-aspek hukumnya,
- c. Klarifikasi hal-hal yang harus diperjelas,

⁴³ *Ibid.*, h. 39-40

- d. Identifikasi jenis kasus,
- e. Hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta referensi lain yang mendukung,
- f. Susun rangkuman kasus serta dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk pembelaan, dan
- g. Sempurnakan secara redaksional dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Duduk perkara (kronologis),
 - 2) Dasar hukum yang dilanggar,
 - 3) Tuntutan/gugatan yang diajukan, dan
 - 4) Dasar hukum tuntutan/gugatan.

8. Batas Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan mengingat masyarakat miskin biasanya menjadi kelompok yang termarginal. Latar belakang pendidikan mereka yang kurang, menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka akan akses keadilan. Sementara itu esensi dari hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Radburch, dalam praktik hukum diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan yang terakhir barulah

kepastian hukum.⁴⁴ Hukum harus diberlakukan secara adil untuk menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum.

Diskursus tentang Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana tidak akan lepas dari pembicaraan tentang korelasi antar supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Kualitas perlindungan dan promosi tentang Hak Asasi Manusia maupun supremasi hukum di suatu negara merupakan dua dari sekian banyak “*Indices of Democracy*”. Hal ini merupakan indikator ada atau tidaknya demokrasi di suatu negara.⁴⁵ Secara umum, hukum hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah.⁴⁶

Selanjutnya untuk mengatur kepentingan hukum tersebut, maka negara seharusnya mengatur pula tentang kewenangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pengaturan tersebut merupakan salah satu model kebijakan hukum pidana pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*). Kebijakan tersebut harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan dari kebijakan sosial berupa “*social welfare*”

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 288.

⁴⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 100.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 144-145.

dan “*social defence*”.⁴⁷ Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilakukan oleh paralegal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum yakni untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Bantuan hukum yang dilakukan dapat berupa mewakili, mendampingi, menjalankan kuasa, memberikan pembelaan dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pendampingan penerima bantuan hukum pada sidang pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya dapat dilakukan oleh profesi advokat. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum ketika sudah dalam proses sidang pengadilan tidak dapat dilakukan oleh paralegal. Paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum apabila penyelesaian masalah hukum tersebut diselesaikan secara non-litigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum di Indonesia dapat dilihat sebagai mediator dalam penyelesaian hubungan industrial, pendampingan dalam penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

⁴⁷ Brada Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 77.

dan mengenai pemberi bantuan hukum, maka paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan penyusunan laporan mengenai bantuan hukum yang diberikan.

Paralegal memiliki peranan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipoetra merupakan sistem pengendalian kejahatan. Bekerjanya peradilan pidana dilakukan oleh lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁴⁸ Paralegal akan membantu masyarakat miskin untuk menghadapi masalah hukum yang diperiksa sepanjang tidak beracara pada sidang pengadilan. Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum harus dilaksanakan secara seimbang. Pemenuhan kewajiban dan hak seimbang ini menyenangkan, membahagiakan, menentramkan dan memuaskan pihak-pihak. Inilah sebenarnya hakikat tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴⁹

9. Jaminan Seseorang Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum di Indonesia

Sebuah jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Indonesia telah

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 35.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 8.

merativikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik -*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.⁵⁰

Pada dasarnya hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia, bahwa negara wajib melindungi hak setiap warga negara dan negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum setidaknya menunjukkan kesungguhan negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu harus dipahami tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yaitu:

⁵⁰ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h. 47.

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan keadilan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undnag-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga). Ada 3 (tiga) prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang

tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁵¹ Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan: “Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”. Kemudian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan: “Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Sebenarnya bantuan hukum dapat diartikan sebagai segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu, adapun bantuan hukum menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jasa hukum

⁵¹ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), h. 97-98.

yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁵²

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib atau baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu terpenuhi. Bantuan hukum adalah instrument paling penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak atau kebebasan dan hak atas jiwa raga tersangka/terdakwa.⁵³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵² Abdurrahman, *Pembangunan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980). h. 112.

⁵³ Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006). h. 237.

dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum harus ditegakan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya.⁵⁴

Hak-hak warga ini tidak akan ada artinya sama sekali bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya) membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara dengan sewenang-wenang. Praktik-praktik seperti ini menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum.⁵⁵

Hak tersangka dapat dikembangkan baik dengan Undang-Undang, putusan pengadilan (yurisprudensi) maupun dengan cara-cara yang baik dalam penegakan hukum. Menurut Mardjono asas-asas yang telah disebutkan di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang *due process of law* (proses hukum yang adil) yang salah satu unsurnya yaitu tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahukan dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009). h. 1-2.

⁵⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). h. 111.

penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa atau penuntut.⁵⁶

Pengertian bantuan hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap⁵⁷ menyatakan bahwa: “Bantuan Hukum yang dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum pada setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”. Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. *Ibid.*, h. 348.

10. Tentang Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ilmu tentang hukum di dalam agama Islam. Hukum Islam ini adalah sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* yang berarti suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lainnya. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam seperti Syari'at Islam, Fiqh, dan beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam sendiri merupakan istilah khas orang Indonesia.⁵⁸

Hukum secara etimologis adalah sebuah kumpulan aturan baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Sedangkan untuk arti hukum jika dikaitkan dengan Islam, maka, hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW, baik yang langsung maupun yang tidak langsung untuk mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Di samping itu pula, hukum Islam haruslah memiliki kekuatan untuk mengatur baik secara politis maupun secara sosial.

M. Hasbi ash-Shiddeqy berpendapat tentang hukum Islam secara terminologis yaitu koleksi daya upaya para ahli hukum untuk

⁵⁸ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 22.

menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im berpendapat bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika dan hukum.⁵⁹

Hukum Islam atau yang sering disebut dengan sebutan Syariat Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT (al-Qur'an) dan Sunnah nya Rasulullah SAW (Hadist) mengenai tingkah laku manusia atau mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini. Syariat Islam menurut bahasa adalah jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala, sedangkan menurut istilah Syariat Islam ialah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa langsung oleh Rasul SAW, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).⁶⁰

Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah SWT saja. Tetapi mengatur seluruh kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan ini bersumber pada al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja. Akan tetapi, semua aturan-aturannya untuk diterapkan dalam sendi kehidupan manusia.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 52.

⁶⁰ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 10.

⁶¹ *Ibid.*, h. 11.

Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hukuman, hikmah dan sebagainya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia.

Hadist ialah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah SAW. Dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur'an.⁶²

Secara umum tujuan hukum Islam yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak untuk yang mudhorat ialah yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, hukum Islam itu bertujuan untuk kemashlahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani individu dan sosial. Kemashlahatan (kebahagiaan hidup) disini tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk kehidupan yang kekal

⁶² *Ibid.*, h. 13.

di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 hukum Islam⁶³ yaitu:

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Memelihara Harta

Berdasarkan rumusan Abu Ishaq al-Shatibi ini kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. kelima tujuan hukum Islam ini di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Tujuan hukum Islam tersebut bisa dilihat dari 2 segi, yaitu:

- a. Ketika dilihat dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya tujuan hukum Islam adalah:

- 1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat *Primer/Daruriyyat*, adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar terwujud. *Sekunder/Hajjiyat*, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya; kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Dan *Tersier/Tahsiniyyat*,

⁶³ *Ibid.*, h. 15.

adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya yang primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

2) Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

3) Untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh atau pemahaman tentang syariah.

b. Ketika dilihat dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan. Kepentingan hidup yang disebut dengan membawa dampak positif dan manfaat merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam,⁶⁴ diantaranya:

1) Pemeliharaan atas Agama

Pemeliharaan atas agama merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta

⁶⁴ *Ibid.*, h. 17-20

akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya dan benda dalam masyarakat. Karena itu Islam wajib melindungi agama yang dianut orang lain dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinannya masing-masing disetiap individu atau masyarakat. Surah Al-Kafirun Ayat 6 mengatakan:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “*Untukmu agamamu, dan untukulah, agamaku*”.⁶⁵

2) Pemeliharaan atas Akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan mengingat dalam hukum Islam dengan menggunakan akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Sebagai contoh untuk memelihara akal dalam hukum Islam Allah SWT melarang meminum setiap minuman yang memabukan yang disebut dengan istilah Khamar dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim*, (Surakarta: Banyuwanyar, 2009). h. 604.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

3) Pemeliharaan atas Jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang wajib pula, yaitu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam Islam dilarang untuk saling membunuh sesuai dengan Q.S Al-Israa’ yang terdapat dalam Ayat ke 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁶⁶

4) Pemeliharaan atas Keturunan

⁶⁶ Ibid.,. h. 285.

Pemeliharaan atas keturunan ini agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi Q.S An-Nisaa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ حِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶⁷

Larangan Perkawinan Q.S An-Nisaa’ Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶⁸

⁶⁷ Ibid., h. 78.

⁶⁸ Ibid., h. 81.

Larangan berzina Q.S Al-Israa' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.⁶⁹

5) Pemeliharaan atas Harta

Harta ialah pemberian Tuhan kepada manusia baik individu ataupun kelompok agar manusia itu dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh sebab itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang dihalalkan dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Misalnya tentang Penipuan terdapat dalam Q.S An-Nisaa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

⁶⁹ Ibid., h. 285.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷⁰

Ayat tentang penggelapan Q.S An-Nisaa' yang terdapat dalam Ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".⁷¹

Ayat tentang pencurian yang terdapat dalam Surah Al-Maa'idah Ayat ke 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁷²

⁷⁰ Ibid., h. 83.

⁷¹ Ibid., h. 87.

⁷² Ibid., h. 114

B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian *Pertama* yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra yang berjudul “Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung tentang Hak Politik Mantan Koruptor. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitiannya yaitu dari dokumen-dokumen resmi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian *Kedua*, yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Dewi Fortuna Muchsin yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.

Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari dokumentasi, observasi dan interview. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat yaitu; *Pertama*, tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*). *Kedua*, berlaku terbatas jangka waktu hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. *Ketiga*, dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. *Keempat*, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain, di antaranya:

1. Tidak ada skripsi yang membahas tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, ada salah satu skripsi dalam penelitiannya ia membahas tentang Bantuan Hukum di kantor *Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia*, dan
2. Skripsi ini merupakan skripsi satu-satunya yang membahas tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018

Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2018 dan diregister dengan Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2018.⁷³

Kewenangan Mahkamah Agung pada Pasal 24A Ayat (1) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, h. 3.

2. Pemohon dan Kepentingan Hukum

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

- a. Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - 1) Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 - 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

c. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama dan alamat Pemohon.
- 2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikannya dengan jelas bahwa:
 - a) Materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- 4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.⁷⁴

Menurut Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat sesuai dengan Berita Acara Sumpah Advokat dan menjadi Anggota Aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan pihak yang kepentingan dan kedudukannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum sehingga Para Pemohon merasa resah

⁷⁴ *Ibid.*, h. 11-12.

dan menduga bahwa kedudukan Profesi Advokat yang diembannya sebagai Profesi Mulia (*Officium Nobile*) diambil alih kedudukannya oleh Paralegal yang dinyatakan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Bahwa dalam Pasal 4 Huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, berbunyi: “...memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat...” dan Pasal 4 Huruf b “... berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun...”. Pasal 11 yang berbunyi: “Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar”. Pasal 12 yang berbunyi: “(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan hukum yang sama, (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima

Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Pendampingan Advokat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan syarat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum”. Pasal 7 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi: “...lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum...”⁷⁵

3. Pokok Perkara

Fokus perhatian Pemohon adalah kedudukan Profesi Advokat dapat diambil alih oleh Paralegal melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yakni:

- a. Pasal 4 Huruf c yang berbunyi: “...memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat...” Dan Pasal 4 Huruf b “... berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun...”.
- b. Pasal 11 yang berbunyi: “Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar”.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 14-15.

c. Pasal 12 yang berbunyi:

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan hukum yang sama

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a. *Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan,*

b. *Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan*

c. *Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.*

(3) Pendampingan Advokat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan syarat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum”.

d. Pasal 7 Ayat (1) Huruf c yang berbunyi: “...lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum...”

Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menurut Pemohon bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- c. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁷⁶

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Adapun sebelum Mahkamah Agung melakukan pertimbangan terhadap substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan mempunyai *legal standing* terlebih dahulu. Selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan alasan sebagai berikut:

⁷⁶ *Ibid*

a. Objek Hak Uji Materiil telah menimbulkan keresahan di kalangan advokat karena bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

1) Pasal 4 Huruf b objek Hak Uji Materiil yang mengatur usia paralegal paling rendah 18 (delapan belas) tahun, merupakan hal yang mustahil apabila seseorang di usia tersebut sudah memahami ilmu hukum tanpa dibekali pendidikan hukum tingkat sarjana untuk melaksanakan advokasi kepada advokasi.

2) Pasal 4 Huruf c objek Hak Uji Materiil, disaat seorang paralegal di Indonesia beracara di muka pengadilan tanpa memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Hukum dan selanjutnya tidak ada penjelasan dalam Pasal lainnya mengenai pengetahuan tentang advokasi masyarakat yang seperti apa, sehingga rentan terjadi kekeliruan di saat proses beracara di persidangan baik di saat teknis maupun administratif di saat seorang paralegal yang berdiri sendiri berhadapan dengan seorang advokat.

b. Objek Hak Uji Materiil dapat mengacaukan tatanan sistem pendidikan beracara pada peradilan Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Advokat; Pasal 7 Ayat (1) Huruf c objek Hak Uji Materiil membuat kabur, membingungkan dan tidak jelas tentang pelatihan bagi paralegal

yang dapat dilatih oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- c. Objek Hak Uji Materiil berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambil alih kedudukan profesi advokat bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- d. Muatan materi objek Hak Uji Materiil dinilai cacat hukum karena telah melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sebab muatan materi objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Objek Hak Uji Materiil patut diduga menyamakan dirinya dengan pengadilan-pengadilan tinggi Indonesia:

Bahwa terhadap objek Hak Uji Materiil yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pasal 4: Untuk dapat direkrut menjadi paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.
 - 4) Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pasal 7 Ayat (1): Pelatihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
- 1) Pemberi bantuan hukum.
 - 2) Perguruan tinggi.
 - 3) Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum.
 - 4) Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- c. Pasal 11: Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.
- d. Pasal 12 Ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.

e. Pasal 12 Ayat (2): Pendampingan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) meliputi:

- 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan.
- 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan.

Pasal 12 Ayat (3): Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan bantuan hukum.⁷⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendapat Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan objek permohonan yang dimohonkan pengujiannya mengatur mengenai Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun di dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Advokat dan objek permohonan Hak Uji Materiil tidak

⁷⁷ *Ibid.*, H. 21-25.

dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum setidaknya terdapat 4 kata kunci berkaitan dengan paralegal, yaitu:

- a. Seorang *Legal Assistant* yang tugasnya membantu seorang *Legal* dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang *Legal*.
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum.
- c. Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan.
- d. Dilakukan *supervisi* oleh advokat atau badan hukum lainnya.

Oleh karena paralegal melaksanakan fungsi “*membantu*” tugas-tugas *Legal* yang didalam objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) ini adalah advokat, maka syarat-syarat dan penyelenggaraan pelatihannya tidak sama dengan advokat. Sebagai pelaksana fungsi membantu yang juga disupervisi oleh advokat, maka syarat termasuk usia dan pengetahuan serta penyelenggaraan pelatihannya sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Huruf b dan c serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf c tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, karena memang Paralegal tidak melaksanakan fungsi advokat tetapi melaksanakan fungsi membantu advokat.

Bahwa dengan demikian Pasal 4 Huruf b dan c serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf c objek permohonan pengujiannya tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sebab muatan materi Pasal 4 Huruf b dan c serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf c objek permohonan Hak Uji

Materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pada objek permohonan pengujian pada Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Bahwa dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan pengujiannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan

Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁸

2. Amar Putusan

Amar Putusan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum mengadili dan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon: I. BIREVEN ARUAN, S.H., II. JOHAN IMANUEL, S.H., III. MARTHA DINATA, S.H., IV. ABDUL JABBAR, S.H., V. IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H., VI. IKA ARINI BATUBARA, S.H., VII. DENNY SUPARI, S.H., VIII. LIBERTO JULIHARTAMA, S.H., IX. STEVEN ALBERT, S.H., X. ABDUL SALAM, S.H., XI. ADE ANGGRAINI, S.H., XII. ARNOL SINAGA, S.H., XIII. ASEP DEDI, S.H., XIV. INDRA RUSMI, S.H., XV. FISTA SAMBUARI, S.H., XVI. ALVIN MARINGAN, S.H., XVII. TEUKU MUTTAQIN, S.H., dan XVIII. ENDIN, S.H. tersebut untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

⁷⁸ *Ibid.*, h. 26-27.

tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum;

- c. Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- e. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang selebihnya;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Irfan Fachruddin Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Yosran dan Is Sudaryono Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan Adi Irawan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.⁷⁹

Menurut Penulis, putusan hakim yang diambil dalam Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan putusan yang sebaik-baiknya. Mengingat pada Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum secara tidak langsung telah mengambil alih profesi Advokat sehingga membuat keresahan tersendiri bagi Profesi Advokat. Sehingga setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini membuat Para Profesi Advokat dapat bernafas lega karena tidak takut lagi profesinya terambil alih oleh Profesi Paralegal.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 28-29.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, atas dasar permohonan yang telah diajukan dalam Pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, menyatakan bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 4 Huruf b dan c, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c. Dimana di dalam regulasi tersebut mengatur usia paralegal paling rendah 18 (delapan belas) tahun, merupakan hal yang mustahil apabila seseorang di usia tersebut sudah memahami ilmu hukum tanpa dibekali pendidikan hukum tingkat sarjana untuk melaksanakan advokasi kepada advokasi.

Pada Pasal selanjutnya tidak adanya kejelasan terhadap pelatihan Paralegal yang dilatih langsung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga bisa mengambil alih kedudukan profesi advokat. Akan tetapi, Pasal 4 Huruf b dan c serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf c tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan tidak melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, karena memang Paralegal tidak melaksanakan fungsi advokat tetapi melaksanakan fungsi membantu advokat.

Bahwa selanjutnya dasar pertimbangan hakim terhadap Pasal 11 Dan Pasal 12 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, dan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Isi dalam Pasal 11 dan Pasal 12 memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan ini dimaknai bahwa Paralegal mampu menjalankan sendiri proses pemeriksaan di pengadilan dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwasannya terbukti pada Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan sebagian.

Dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni Pasal 1 Ayat (1) dan (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Advokat.

Berdasarkan atas dasar pertimbangan yang didasarkan dengan dalil-dalil para pemohon, Mahkamah Agung memutuskan *a quo* bertentangan sebagian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Adapun keberadaan Paralegal hanya sebatas untuk membantu Profesi Advokat, oleh karenanya keberadaan Paralegal di Indonesia seharusnya membantu Profesi Advokat dan bernaung di bawah Advokat sehingga dalam kegiatan litigasi (proses beracara di muka pengadilan) Paralegal tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus tetap di bawah naungan Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang Paralegal tidak dapat beracara secara litigasi di pengadilan, karena tugas Paralegal hanya sebatas membantu Profesi Advokat dan hanya Advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka

Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan Profesi Advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Hukum

Manusia adalah Makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang di tunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, dalam realita kehidupannya manusia harus berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. al-Qur'an merupakan sumber utama Hukum Islam yang pertama dan hukum-hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Sedangkan Hadist merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.

Berdasarkan pandangan ini, maka manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai individu di hadapan Sang Penciptanya yaitu Allah SWT. Allah SWT memerintahkan para penguasa (*umara*) menunaikan amanat kehakiman peradilan dengan menetapkan hukum dan memutuskan perkara diantara manusia dengan adil, baik dalam masalah darah, harta, kehormatan, hal kecil maupun hal besar. Begitupun kepada kerabat maupun bukan kerabat, kawan maupun lawan dan orang baik maupun orang jahat juga masuk dalam amanat ini. Keadilan dari pihak pemerintah sebagai satu amanat yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya. Adil disini yaitu yang mengikuti syariat Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW seperti dalam masalah hukum (*ahkam*) maupun *hudud*. Sesungguhnya Allah SWT bersama hakim selagi ia tidak aniaya. Apabila

ia berbuat aniaya dalam keputusannya maka Allah SWT menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (menjauh darinya).

Pembahasan dalam skripsi ini mengenai Paralegal tidak terlepas dari pembahasan Hak Asasi Manusia karena Paralegal di sini berjuang untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Dalam Islam, pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia sangatlah luas dan baik di dalam al-Qur'an, Hadist, Pendapat para Ilmuwan fikih dan rumusan Hak Asasi Manusia internasional. Di dalam al-Qur'an Allah SWT banyak berfirman mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ditinjau dari Hukum Islam terdapat firman Allah SWT yang mengatur tentang keadilan, persamaan, kesamaan derajat umat manusia dan hak-hak pendukung lainnya.

Apabila menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dalam mengabulkan permohonan uji materil yang termaktub kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam yang membahas perihal Hak Asasi Manusia tentunya memuat beberapa prinsip dalam Hukum Islam, seperti:

1. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhan (*al-Tauhid*) dijadikan pedoman utama oleh setiap Penegak Hukum, baik Pemberi Bantuan Hukum maupun Penerima Bantuan Hukum dalam menegakan hukum. Dalam prinsip ini, siapapun yang terlibat dalam penegakan hukum harus meyakini bahwa

pembuat hukum yang mutlak adalah Allah SWT. Maka dalam hal ini segala bentuk upaya yang telah dilakukan dalam proses penegakan hukum hendaklah didasari oleh kedasaran bahwa dalam menegakan hukum harus dengan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah SWT.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya, sumpah merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk komitmen seseorang dalam menegakan hukum di hadapan Allah SWT. Sumpah merupakan sesuatu yang sakral apabila sumpah itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi moral maupun hukum yang harus di pertanggungjawabkan kepada diri sendiri, masyarakat, pejabat yang menyumpah dan terlebih tanggung jawab kepada Allah SWT.

Sejarah Islam sumpah adalah pernyataan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah dikuatkan dengan kalimat sumpah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah Ayat 224-225 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (224). Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (225)”⁸⁰.

2. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Pemberian bantuan hukum erat kaitannya dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh kalangan advokat maupun paralegal yang diarahkan bagi penguatan aspek pemintaan meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar,
- b. Meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka,
- c. Meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.

Prinsip keadilan menurut al-Qur'an, bahwa manusia itu memiliki kewajiban untuk menegakan hukum Allah dan dilarang dalam menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Q.S Al-Maidah Ayat 42:

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim, Ibid.*, h. 35-36.

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ^ط وَإِنْ تَعَرَّضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا^ط وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”⁸¹

Surah Al-Maidah Ayat 42 ini menjelaskan bahwasannya harus berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien agar pada saat ia dikalahkan harus menerima kekalahannya dengan lapang dada. Begitupun sebaliknya, saat ia menerima kemenangan maka harus menerima kemenangan tersebut sebagai pengembalian haknya. Karena seorang advokat maupun paralegal memang harus mampu memberikan keterangan secara baik kepada kliennya untuk membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kliennya untuk kemenangan. Karena esensi dari proses peradilan adalah bukan menang atau kalah, tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.

⁸¹ Ibid., h. 115.

Selanjutnya terdapat firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Maidah Ayat 49 yaitu:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁸²

Menurut Abduh dalam tafsirannya dijelaskan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan tanpa memenuhi dua unsur yaitu: *Pertama*, memahami argumentasi kedua pihak berperkara. *Kedua*, jujur dan bersih, tidak memihak atau membenci salah satu pihak. Semua keputusan yang menyimpang dari kedua unsur tersebut adalah kedzaliman.⁸³

Paralegal dituntut untuk berlaku adil, karena tanpa keadilan akan memunculkan keberpihakan kepada pemilik uang dan banyak hal yang menyenangkan sebagaimana yang terjadi di banyak negara

⁸² *Ibid.*, h. 116.

⁸³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz V, H. 175.

termasuk di negara Indonesia sendiri. Bahkan kebencian kepada seseorang tidak boleh menghalangi seseorang untuk berlaku adil. Maka dari itu, paralegal atau para penegak hukum harus berlaku adil dalam keadaan bagaimanapun agar terwujudnya kesejahteraan.

3. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Manusia itu memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁸⁴

⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim*, Ibid., h. 42.

4. Prinsip Hak Atas Advokasi

Bahwa setiap warga negara yang sedang berperkara berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari seorang advokat. Dalam prinsip ini seorang tersangka/terdakwa harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping perkaranya selama proses yang dijalankan dalam rangka penegakan hukum berlangsung. Disebutkan dalam firman Allah SWT Surah An-Nisaa' Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁵

Berdasarkan Ayat di atas, disebutkan perlunya seorang pendamping untuk memutuskan suatu perkara dalam sengketa di lingkup keluarga. Seorang pendamping hukum dalam Islam disebut dengan sebutan Hakam. Hakam yang disebut dalam Surah An-Nisaa' Ayat 35 ini bukan hanya mengurus masalah konflik keluarga, namun dalam kasus pidana juga. Dalam setiap kasus yang terjadi di wilayah

⁸⁵ *Ibid.*, h. 84.

hukum membutuhkan seorang hakim dan bukan hanya seorang saksi saja.

5. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Paralegal sangat memegang erat prinsip ini, di mana menurutnya setiap individu berhak diberlakukan sama di hadapan hukum, termasuk dalam menerima bantuan hukum. Dalam hal ini paralegal atau pemberi bantuan hukum lainnya saat menjalankan tugasnya haruslah adil. Tidak perlu membeda-bedakan antara yang kaya atau si miskin. Karena semua sama di hadapan hukum dan pemberian sanksi untuk tersangka/terdakwa telah didasarkan pada Undang-Undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an Ayat yang mempertegaskan masalah ini adalah Q.S Al-Hujarat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁶

⁸⁶ Ibid., h. 517.

Ayat ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, Ayat ini tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama Ayat ini, "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..." adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah SWT, tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁸⁷

Pengantar kalimat tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir Ayat ini yakni "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi manusia yang lebih mulia di sisi Allah. Dalam Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga diri dan merasa dirinya lebih baik dari pada yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dan sejenisnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.⁸⁸

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012). H. 615-618.

⁸⁸ *Ibid.* h. 619-620.

Ayat ini dapat diketahui bahwa perbedaan kedudukan antar manusia bukan terletak dari suku, bangsa, ras, kasta, warna kulit atau sebagainya. Tetapi yang membedakannya adalah ketakwaan. Sehingga dapat diartikan bahwa manusia diciptakan memiliki hak persamaan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) telah dikenal dan dipraktikan dalam Islam sejak abad ke-7. Suatu saat ketika Nabi SAW melaksanakan Haji Wada'. Dalam pidatonya nabi menyampaikan, "Bahwa Tuhan kamu itu Esa, dan bapak kamu (adam) pun satu. Kamu semua dari Adam AS dan Adam dari tanah. Tiada kelebihan bagi orang Arab terhadap non Arab dan non Arab terhadap Arab. Tiada kelebihan bagi yang berwarna putih terhadap yang berwarna merah kecuali dengan takwa. Sesungguhnya aku telah sampaikan! Tuhanku! Saksikanlah!.

Dalam hal ini, seorang advokat saat menjalankan tugasnya haruslah adil. Tidak pernah membedakan antara orang kaya atau miskin. Karena semua sama di hadapan hukum. Dan pemberian sanksi untuk tersangka/terdakwa telah didasarkan pada undang-undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

6. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pada hakikatnya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Manakala keempat kata tersebut digabungkan, memiliki arti menyuruh yang baik dan melarang yang buruk.⁸⁹

Salman al-Audah mengemukakan bahwa *Amar Ma'ruf* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan *Nahi Munkar* adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai, dan dikenal serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara *Syar'i* dan akal.⁹⁰

Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah SWT dalam kitab-kitabnya, disampaikan rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Adapun pengertian *Nahi Munkar* menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala yang buruk kekejian, segala *Amar Ma'ruf* berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah SWT.⁹¹

⁸⁹ Khairul Umam dan A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 97.

⁹⁰ Salman, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Ummu 'udhama' azmi (Solo: Pustaka Mantiq, 2004), h. 13.

⁹¹ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.15.

Terdapat dalam al-Qur'an tidak kurang dari 38 kata *al-Ma'ruf* dan 16 kata *al-Munkar*. Dalam Q.S Al-Imran Ayat 104 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.⁹²

Ayat di atas menjelaskan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas iman, padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih, sebagai syarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, di mana umat Islam dikenal dengannya, bahkan ia merupakan ciri utama yang membedakannya dari umat-umat lainnya, dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan tugas kembar yang harus digunakan oleh seorang advokat secara simultan dan sikap untuk merespons tugas-tugasnya dalam segala bidang kehidupan, dengan

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim*, Ibid., h. 63.

catatan sesuai dengan kadar dan kemampuan.⁹³ Imam Ghazali menyebutkan bahwa doktrin *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan kutub terbesar agama. Berarti, bahwa masalah tersebut merupakan pokok dan mesti ada sebagai ciri dan watak dasar dari umat Islam yang dapat menentukan eksistensi dan kemulyaan umat.⁹⁴ Oleh sebab itu, seorang advokat harus dapat menjalankan *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar* dengan menggunakan wewenang dan kekuasaannya.

Mengajak pada kebaikan adalah ciri utama orang-orang beriman. Allah SWT selalu menyebutkan jika orang yang beriman di dalam al-Qur'an adalah *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* dengan berbagai redaksi. Maka sebagai masyarakat muslim haruslah menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena kebaikan Negara dan rakyat tidak sempurna. Dalam Q.S Al-Hajj Ayat 41 dijelaskan :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari

⁹³Bambang Widjoyanto, *Koruptor itu Kafir* (Bandung: Mizan, 2010), h. 12.

⁹⁴*Ibid.*

perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.⁹⁵

Ayat ini mengajak untuk setiap muslim dalam melaksanakan kebaikan di dunia dan akhirat, melaksanakan rukun-rukun Islam yang tertera di Ayat tersebut. Melaksanakan kebaikan setiap muslim dengan mengamalkan ajaran dan berbuat *Ma'ruf* untuk semua nilai, maksudnya menjalankan dan membantu orang-orang yang kesusahan, Allah SWT selalu memudahkan kepada orang-orang yang berbuat baik.⁹⁶

Perbuatan yang *Ma'ruf* dengan cara beribadah kepada Allah yang selalu memberikan kemudahan dan pencerahan untuk umatnya, menunaikan zakat bagi orang yang mampu karena peduli pada orang yang ada disekelilingnya yang masih membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun. Kedudukan di muka bumi sangatlah sederhana, dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT, yang selalu dijalankan dengan menjauhkan diri pada keburukan yang akan menyesatkan diri kelak, dalam hal ini sebagai umat Islam harus melihat dan memperhatikan apa yang telah diperkuat selama ini dengan kebaikan atau keburukan.⁹⁷

⁹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim, Ibid.*, h. 337.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), h. 143.

⁹⁷ *Ibid.*

7. Prinsip Tolong Menolong

Pada masa Rasulullah SAW tidak ada seorang muslim pun yang membiarkan muslim lain dalam keadaan kesulitan. Dalam firman Allah SWT Surah At-Taubah Ayat 71 jelas disampaikan sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁹⁸

Ayat ini menerangkan bahwa setiap muslim sama di mata Allah SWT kecuali perbuatan dan keimanan mereka. Anjuran untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kewajiban pertama dari para pemberi bantuan hukum dengan klien akan tercapai dengan cara memberi nasehat hukum (*Legal Advice*), perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara. Dan yang kedua antara Hamba dengan Tuhan akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al-Karim*, *Ibid.*, h. 198.

penuh pengabdian kepada-Nya. Ketika seorang pemberi bantuan hukum menjalankan tugasnya tidak boleh berharap pamrih sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Islam mengenal Paralegal dengan sebutan Lembaga Pemberian Bantuan Hukum (LBH). Secara fungsinya, ahli hukum menyamakan posisi paralegal dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu Hakam, Mufti dan Mushalih-alaiah. Ketiga pemberi bantuan hukum ini secara fungsinya hampir sama dengan Paralegal yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat.

Paralegal atau Bantuan Hukum dalam Islam pun tidaklah sesederhana pemahaman bantuan hukum dalam konsep bantuan hukum dalam konsep barat seperti jasa hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*), akan tetapi konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya memiliki pemaknaan yang lebih luas lagi yakni menjadi seorang yang berfungsi sebagai pemutus hukum dan perantara perdamaian di kalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan paralegal dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang bernilai di mata hukum.

Paralegal dalam hukum positif mengenal asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dalam Islam pun mengenal teori

persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabatnya.

Dalam firman Allah SWT di Surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁹⁹

Ayat di atas tersebut diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam.

Ulama fiqh berpendapat bahwa pemeliharaan dan pendelegasian (*aqad al wakalah*) yang bersifat tolong menolong dibolehkan dalam Islam. Adapun Hadist Rasulullah SAW yang memberikan isyarat tentang izin mengenai kebolehan memberi kuasa kepada orang lain, yaitu:

“Dari Ummu Salamah RA dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya aku adalah manusia biasa lalu kamu datang kepadaku berperkara, barangkali sebagian kamu lebih lihai

⁹⁹ Ibid., h. 106.

mengemukakan argumentasinya dari sebagian yang lain, maka aku memutuskan berdasarkan argumentasi (yang kuat) yang aku dengar, maka barang siapa yang telah kuputuskan baginya sesuatu yang merupakan hak saudaranya maka jangan dia mengambilnya, karena mengambil (sesuatu yang merupakan hak saudaranya itu) sama dengan mengambil sesuatu dari neraka” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁰

Hadist dari Ummu Salamah ini mengisyaratkan argumentasi yang kuat yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara.

Mengenai perwakilan atau pemberian kuasa, ulama fiqh berpendapat bahwa perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada orang lain sah perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya.

Berdasarkan al-Qur'an, Hadist, Perbuatan Sahabat dan Pendapat Para Ulama, perbuatan berwakil dalam suatu perkara sudah dilaksanakan sejak masa Islam karena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, para ulama fiqh membolehkan berwakil di dalam menunjuk pengacara, advokat, paralegal, kuasa hukum dan/atau penasehat hukum.

Adapun hadits berikutnya yaitu tentang memberikan suatu urusan lebih baik kepada yang lebih ahlinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

¹⁰⁰ Muttafaqun 'alaih (HR. Bukhari Muslim), Ensiklopedia Hadits No.1259

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sina) telah menceritakan kepada kami (Fulaih bin Sulaiman) telah menceritakan kepada kami (Hilal bin Ali) dari ('Atho' bin yasar) dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No.6015)¹⁰¹

Berdasarkan Objek penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, peran hakim sangatlah penting, mengingat Hakimlah yang akan memutus putusan yang sedang dipermohonkan. Dalam Islam hakim itu sendiri terdiri dari 3 macam Hakim, di antaranya sudah dijelaskan dalam Hadits Riwayat Tirmidzi No.1244 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il], telah menceritakan kepadaku [Al Hasan bin Bisyr] telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Ubadah] dari [Ibnu Buraidah] dari [ayahnya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga." (HR. Tirmidzi No.1244)¹⁰²

¹⁰¹ Tafsirq, (On-Line) diakses pada laman <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=381> pada Kamis, 20-02-2020 Pukul 16.39 WIB

¹⁰² Ibid

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membagi tipe Hakim menjadi 3, di antaranya:

1. Seorang Hakim yang mengerti kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut, maka dia termasuk Hakim yang akan selamat dan masuk surga.
2. Seorang Hakim yang mengerti kebenaran, tetapi tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran tersebut maka dia termasuk Hakim yang akan masuk Neraka.
3. Seorang Hakim yang tidak memenuhi kriteria sebagai Hakim dan tidak mengetahui kebenaran Islam lalu dia memutuskan suatu perkara berdasarkan kebodohan tersebut maka dia termasuk hakim yang akan masuk neraka.

Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis, dapat dipahami bahwa peran dari para penegak hukum termasuk Paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam al-Qur'an. Telah dijelaskan pula bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam Islam pun telah jelas bahwasannya peran pemberian bantuan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam serta ditunjukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah dengan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 sehingga dalam putusan ini hasil putusan hakim Mahkamah Agung ialah mengabulkan sebagian dengan beberapa pertimbangan dari dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon. Setelah dikeluarkannya putusan ini para advokat tidak akan khawatir lagi akan profesinya terambil alih oleh paralegal.
2. Menurut Hukum Islam, Paralegal diperbolehkan dalam rangka memberi Bantuan Hukum tanpa pandang bulu, karena dalam sejarah Islam pun telah mengenal pemberian kuasa kepada orang lain. Paralegal termasuk dalam Pemberian Bantuan Hukum yang sangat dibutuhkan umat manusia untuk mendapatkan akses keadilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka penulis memberikan saran supaya lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam hal menangani perkara serta dalam memberikan informasi dan pelayanan hukum serta lakukanlah klien secara sama tanpa pembeda

antara ras, etnis, suku, agama, ekonomi, si hitam dan si putih, baik yang kaya maupun si miskin serta lakukanlah pemberian bantuan hukum atas dasar pri kemanusiaan atau berjuang untuk menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih tepatnya untuk menegakan hukum di negara Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006.

Abdurrahman, *Pembangunan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anis Hamim dan Siti Rosmawati, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rika Annisa Women's Crisis Center, 2014.

Arief, Brada Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Buku Panduan Sekolah Paralegal Makassar

Candra, Firman, *Paralegal (Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum)* Cet ke-3, Jakarta: Lembakum Indonesia dan FATOUR Publishing, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an an Al'Karim*, Surakarta: Banyuanyar, 2009.

Erwin, Rudi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*, Jakarta: Raya Carafindo, 2009.

Jawardi, Sumaindra, *Modul Bantuan Hukum UBI JUS IBI REMEDIUM (dimana diletakkan Hak, maka padanyalah pula bersemayam kewenangan untuk menuntut)*, Bandar Lampung: 2018.

Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni, 2006.

Khairul Umam dan A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Kusumah, Mulyana W., *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, Jakarta: YLBH, 1991.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Hadjon Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mulyanuddin, Andi Ferry, *Penyuluhan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Barat*, (Dibuat dalam laman Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 20 Juli 2017).

Muttafaqun ‘alaih (HR. Bukhari Muslim), Ensiklopedia Hadits No.1259

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz V.

Rukmini, Mien, *Pelindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Saebani, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Salman, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Ummu' 'udhama' azmi Solo: Pustaka Mantiq , 2004.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Cet Ke-1 Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Taimiyah, Ibnu. *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, terjemahan Abu Fahmi Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Widjoyanto, Bambang. *Koruptor itu Kafir*, Bandung: Mizan, 2010.

Widyadharma, Ridwan, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

INTERNET

Liputan 6, *Memungut Kaus Luluh, Buruh Tani Dibui*. (On-line), tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/262965/memungut-kasus-luluh-buruh-dibui.com> (5 Mei 2019).

Paralegal (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal.com> (24 September 2019).

Ridho, Muhammad, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <https://m.detik.com/news/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari.com> (5 Mei 2019).

Tafsirq,, (On-Line), tersedia di: <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=381> (Kamis, 20-02-2020 Pukul 16.39 WIB)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22 P/Hum/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.